

KEPALA BALAI KALIBRASI

KEPUTUSAN KEPALA BALAI KALIBRASI  
NOMOR HK.02.02.12.12.25.47 TAHUN 2025  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI KALIBRASI TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI KALIBRASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM di Balai Kalibrasi tentang Rencana Strategis Balai Kalibrasi Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan

- Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
  9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
  10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KALIBRASI TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI KALIBRASI TAHUN 2025-2029
- Kesatu : Menetapkan dan mengesahkan Rencana Strategis Balai Kalibrasi Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Balai Kalibrasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Kalibrasi untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai Kalibrasi dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
  - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Kalibrasi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Desember 2025

KEPALA BALAI KALIBRASI,



HENRY HANDOYO

## KATA PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Balai Kalibrasi Tahun 2025–2029 bersifat indikatif dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan strategi Badan POM serta merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Kalibrasi sebagaimana amanat Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional untuk 5 (lima) tahun ke depan yang disusun

antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Balai Kalibrasi periode 2020–2024, Renstra Badan POM periode 2025–2029, dan perubahan lingkungan strategis pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Perubahan lingkungan strategis pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut Balai Kalibrasi untuk melaksanakan operasionalisasi kegiatannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Dalam rangka keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Badan POM “ Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman, Bermutu dan Berdaya Saing dalam Mendukung Masyarakat Sehat bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” maka dalam pelaksanaannya akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, dapat dilakukan perubahan muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya melalui mekanisme yang berlaku dengan mengacu kepada RPJMN 2025–2029.

Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Balai Kalibrasi dan diharapkan seluruh komponen Balai Kalibrasi dapat bekerjasama dan berpartisipasi aktif dalam menjalankan setiap program/kegiatan yang telah direncanakan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja, dan individu.

Apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Balai Kalibrasi Tahun 2025–2029. Semoga seluruh upaya kolaboratif ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan petunjuk dalam menjalankan tugas mulia dalam rangka melindungi masyarakat dan mewujudkan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan bermanfaat.

Kepala Balai Kalibrasi,



Henry Handoyo

# RANCANGAN RENCANA STRATEGIS

# BALAI KALIBRASI 2025-2029



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I	
PENDAHULUAN .....	2
I.1. KONDISI UMUM .....	2
I.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN .....	15
BAB II	
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN BALAI KALIBRASI .....	27
II.1. VISI .....	27
II.2. MISI .....	28
II.3. TUJUAN .....	30
II.4. SASARAN KEGIATAN .....	34
BAB III	
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	41
III.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM.....	41
III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	45
BAB IV	
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	50
IV.1. TARGET KINERJA .....	50
IV.2. KERANGKA PENDANAAN .....	50
BAB V	
PENUTUP .....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai Kalibrasi .....	3
Gambar 1. 2 Tren realisasi jumlah alat Lab yang dikalibrasi tahun 2020-2024 .....	7
Gambar 1. 3 Tren realisasi jumlah alat Lab yang dikalibrasi tahun 2020-2024 .....	8
Gambar 2. 1 Misi Asta Cita Presiden .....	28
Gambar 2. 2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM terkait Tugas dan Fungsi Balai Kalibrasi serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai Kalibrasi 2025–2029 .....	34

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Capaian Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Kalibrasi Tahun 2020-2024.....	5
Tabel 1. 2 Perhitungan Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi.....	17
Tabel 1. 3 Pemenuhan ABK Balai Kalibrasi sesuai Pedoman ABK Tahun 2020 (Data diambil dari aplikasi SIREN bulan Desember 2025) .....	18
Tabel 1. 4 Matriks SWOT Balai Kalibrasi .....	25
Tabel 2. 1 Indikator Tujuan BPOM 2025–2029 .....	32
Tabel 2. 2 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai Kalibrasi.....	37
Tabel 3. 1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025–2029.....	44
Tabel 3. 2 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Balai Kalibrasi 2025–2029.....	46
Tabel 4. 1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan .....	50
Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Balai Kalibrasi Berdasarkan Kegiatan....	51
Tabel 4. 3 Kerangka Pendanaan Balai Kalibrasi Berdasarkan Sumber Dana .....	51

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN.....	54
---	----

# DIKOLABORASI

DIGITALISASI TATA KELOLA PERALATAN  
LABORATORIUM DAN LAYANAN KALIBRASI

## BAB I PENDAHULUAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. KONDISI UMUM**

Balai Kalibrasi BPOM merupakan UPT PPPOMN yang memiliki tugas layanan kalibrasi sesuai dengan kompetensinya dalam pemenuhan ISO/IEC 17025:2017 sebagai laboratorium kalibrasi. Pelayanan yang diberikan oleh Balai Kalibrasi terkait dengan layanan kalibrasi untuk semua laboratorium yang dimiliki oleh Balai Besar dan Balai POM di seluruh Indonesia.

Kalibrasi peralatan laboratorium merupakan salah satu proses penting dalam pengawasan keamanan dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan. Hal ini sangat penting dalam menjaga akurasi dan ketertelusuran dalam Jaminan Mutu dan Hasil Pengujian (JMHP) yang diterbitkan oleh semua laboratorium BPOM sebagai laboratorium yang terakreditasi dan diakui secara internasional. Melalui pelaksanaan kalibrasi peralatan laboratorium yang baik dan terstandarisasi, pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan akan menghasilkan data yang akurat dan terpercaya dalam rangka mendukung upaya pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

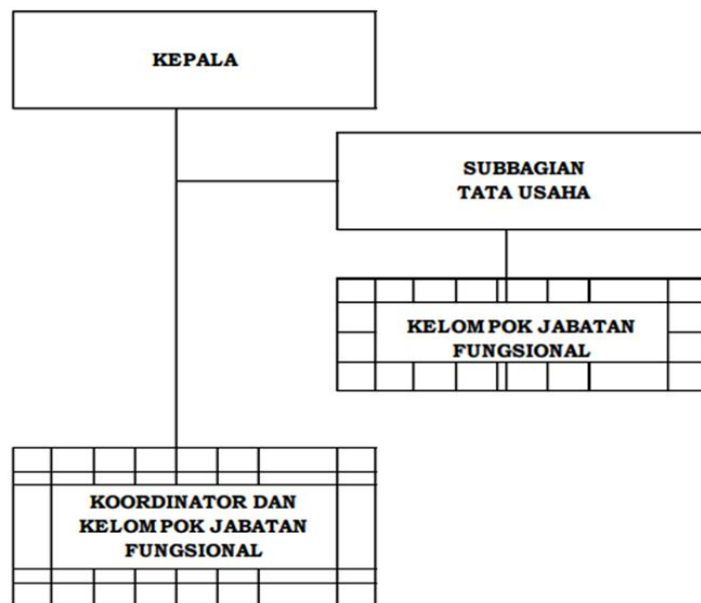
Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan. Balai Kalibrasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. pelaksanaan penjaminan ketertelusuran kebenaran nilai ukur terhadap pemenuhan standar acuan kalibrasi;
3. pelaksanaan layanan teknis kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan;
4. pelaksanaan pengembangan metode kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan penyusunan standar kebutuhan peralatan laboratorium dan sarana;
6. prasarana pengujian Obat dan Makanan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
8. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Selain fungsi tersebut, Balai Kalibrasi sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di PPPOMN dan merupakan satuan kerja mandiri juga turut serta melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Struktur organisasi Balai Kalibrasi diatur dalam Lampiran III Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Balai Kalibrasi dipimpin oleh Kepala Balai dengan dibantu Kepala sub bagian tata usaha dan para pejabat fungsional sesuai masing-masing penugasannya.

Susunan organisasi Balai Kalibrasi terdiri atas: Kepala; Subbagian Tata Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Organisasi Balai Kalibrasi digambarkan seperti bagan berikut:



**Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai Kalibrasi**

Rencana Strategis (Renstra) Balai Kalibrasi BPOM tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh Balai Kalibrasi BPOM untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dalam upaya untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

### I.1.1. Capaian Kinerja Balai Kalibrasi Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020–2023 indikator utama Balai Kalibrasi merupakan bagian Renstra Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN).

Capaian kinerja Balai Kalibrasi periode tahun 2020–2023 masuk kriteria pencapaian indikator kinerja kategori Sangat Baik. Pada tahun 2021 diperoleh capaian kinerja kategori Baik, hal ini karena adanya kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan COVID-19 sehingga pengadaan peralatan laboratorium BB/BPOM tidak dilakukan yang berdampak jumlah alat laboratorium yang dikalibrasi tahun 2021 menjadi tidak sesuai dengan yang ditargetkan.

Pada tahun 2024, Balai Kalibrasi melaksanakan 10 (sepuluh) sasaran kegiatan dengan 12 (dua belas) indikator kinerja. Diperoleh capaian 8 (delapan) indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik ( $100% < x \leq 120%$ ), 2 (dua) indikator kinerja dengan kategori Baik, dan 2 (dua) indikator kinerja dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan ( $> 120%$ ).

Capaian kinerja Balai Kalibrasi tahun 2020–2024 sebagaimana tabel 1.1. berikut:

**Tabel 1. 1 Capaian Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Kalibrasi Tahun 2020-2024**

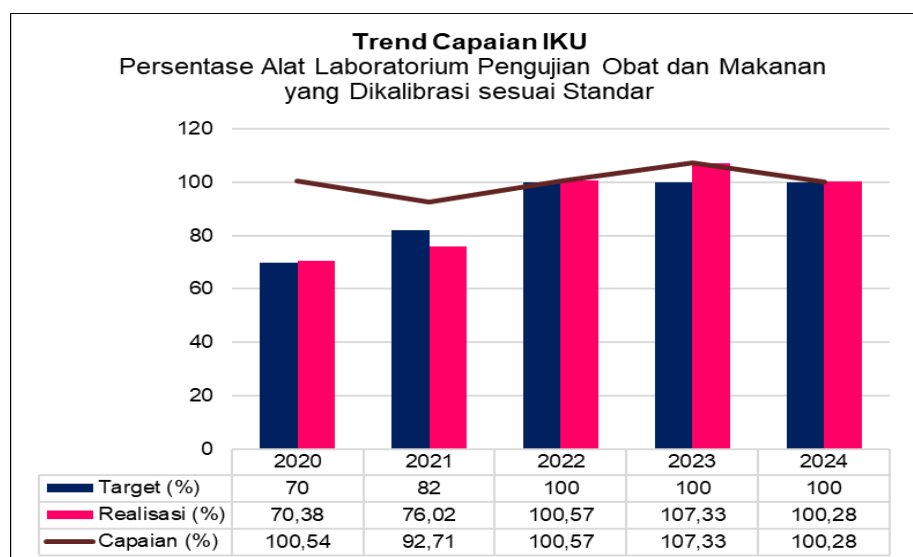
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar															
Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	70%	70,38%	100,54	82%	76,02%	92,7	100%	100,57%	100,57	100%	107,33%	107,33	-	-	-
Tercapainya peralatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berkualitas dan berkelanjutan															
Persentase laboratorium BPOM yang memenuhi standar peralatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100,28%	100,28
Tercapainya kepuasan stakeholder terhadap layanan Balai Kalibrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,0%	88,24%	100,27
Tercapainya kepuasan stakeholder terhadap layanan Balai Kalibrasi															
Nilai survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Kalibrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77%	91,69	119,07
Pelaksanaan kalibrasi alat laboratorium pengujian obat dan makanan yang optimal															
Persentase layanan kalibrasi yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83%	100%	120,48
Pengelolaan peralatan laboratorium PPOMN yang optimal															
Persentase pemeliharaan alat laboratorium yang diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95%	99,98%	105,24

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Nilai pemenuhan standar peralatan PPOMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,48	92,95	100,51
Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi															
Indeks Pelayanan Publik Balai Kalibrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,55	4,35	122,53
Terwujudnya SDM Balai Kalibrasi Yang Berkinerja Optimal															
Indeks Profesionalisme ASN Balai Balai Kalibrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,33	89,9	101,77
Terkelolanya laboratorium kalibrasi															
Terpeliharanya status akreditasi Balai Kalibrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100
Terpenuhinya Standar Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Kalibrasi															
Nilai pemenuhan standar kemampuan laboratorium Balai Kalibrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95%	96,61%	101,69
Terkelolanya keuangan Balai Kalibrasi secara akuntabel															
Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Kalibrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	95,78	101,89

1. Sasaran Kegiatan (SK 1): Tercapainya peralatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berkualitas dan berkelanjutan.

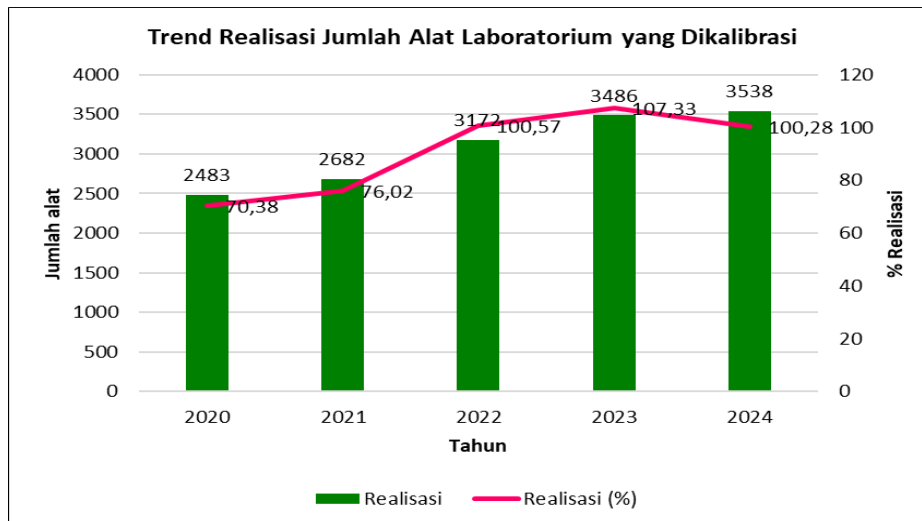
Indikator Kinerja (IKK 1): Persentase alat laboratorium yang terjamin ketertelusuran nilai benarnya sesuai standar.

Indikator ini mengukur alat laboratorium yang berfungsi sebagai alat ukur atau memiliki satuan ukuran yang tertelusur hingga satuan internasional. Persentase capaian alat laboratorium yang dikalibrasi dalam 5 tahun terakhir (2020–2024) mengalami peningkatan dengan kriteria Sangat Baik seiring dengan adanya penambahan dan perluasan ruang lingkup kalibrasi yang telah terakreditasi oleh KAN. Perluasan ruang lingkup kalibrasi menyebabkan lebih banyak peralatan laboratorium yang dikalibrasi. Hal ini juga yang menjadi salah satu faktor capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan.



**Gambar 1. 2 Tren realisasi jumlah alat Lab yang dikalibrasi tahun 2020-2024**

Meskipun capaian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 92,71% karena adanya Pandemi COVID-19, namun berdasarkan Tren Realisasi Jumlah Alat Laboratorium yang Dikalibrasi selama periode Renstra 2020–2024, selalu terjadi peningkatan jumlah alat yang dikalibrasi hingga tahun 2024 sebesar 3528 alat dan kriteria persentase realisasi alat laboratorium yang dikalibrasi sebesar 100,28% (Sangat Baik).



**Gambar 1. 3 Tren realisasi jumlah alat Lab yang dikalibrasi tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja (IKK 2): Persentase laboratorium BPOM yang memenuhi standar peralatan laboratorium yang ditetapkan. Pada indikator ini realisasi sebesar 100,27% dengan capaian 88,0%. Perhitungan capaian pemenuhan laboratorium sesuai standar SKL. Pada tahun 2024 standar Kemampuan Laboratorium (SKL) untuk peralatan masih menjadi satu antara 3 (tiga) UPT dan PPPOMN, sehingga untuk target pemenuhan yang harus ditingkatkan di Balai kalibrasi adalah untuk komponen Kompetensi dan Ruang Lingkup. Dalam peningkatan Nilai SKL, ketiga komponen (Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi, dan Standar Peralatan) saling mempengaruhi dimana untuk peningkatan ruang lingkup diperlukan peralatan yang mendukung ruang lingkup tersebut dan ketersediaan SDM yang kompeten. Kebijakan strategi organisasi juga sangat menentukan hasil akhir nilai SKL. Diharapkan untuk Renstra yang akan datang terkait pemenuhan SKL bisa teratasi terutama untuk ketersediaan SDM yang kompeten.

2. Sasaran Kegiatan (SK 2): Tercapainya kepuasan stakeholder terhadap layanan Balai Kalibrasi

Indikator Kinerja (IKK 3): Nilai survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Kalibrasi.

Nilai survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Kalibrasi pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 91,69 termasuk kategori Sangat Baik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah alat yang digunakan oleh instansi pemerintah dan organisasi untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atau pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. IKM bertujuan untuk menilai kinerja

pelayanan publik, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan memastikan kualitas layanan yang lebih baik di masa mendatang

3. Sasaran Kegiatan (SK 3): Pelaksanaan kalibrasi alat laboratorium pengujian obat dan makanan yang optimal.

Indikator Kinerja (IKK 4): Persentase layanan kalibrasi yang diselesaikan tepat waktu.

Yang dimaksud tepat waktu adalah layanan kalibrasi diselesaikan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan dalam standar pelayanan publik. Perhitungan tepat waktu adalah penerbitan sertifikat kalibrasi yang sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan (In-situ dihitung maksimal 15 hari kerja setelah hari terakhir pelaksanaan kalibrasi. Ex-situ dihitung maksimal 30 hari kerja setelah surat permintaan dan alat diterima).

Persentase layanan kalibrasi yang diselesaikan tepat waktu dapat tercapai 100% ini menunjukkan Balai Kalibrasi mampu melaksanakan kegiatan pelayanan kalibrasi yang sesuai dan tepat waktu. Ke depannya dengan adanya perubahan strategi manajemen laboratorium, hal ini menjadi faktor yang diperhitungkan untuk menjadi satker yang mandiri.

4. Sasaran Kegiatan (SK 4): Terlaksananya perencanaan pemenuhan alat laboratorium BPOM yang efektif dan efisien.

Indikator Kinerja (IKK 5): Persentase rekomendasi perencanaan pemenuhan alat laboratorium BPOM yang diselesaikan tepat waktu.

Rekomendasi perencanaan pemenuhan alat laboratorium BPOM adalah dokumen rekomendasi perencanaan pengadaan peralatan yang diajukan pada awal tahun oleh UPT BPOM untuk kebutuhan pengadaan tahun H+1 sebagai data dukung pengajuan pagu anggaran oleh Biro Perencanaan BPOM kepada instansi terkait.

Tepat waktu adalah standar waktu pemberian rekomendasi sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan pada SOP Makro BPOM POM-06.03/CFM.01/SOP.01 (20 hari kerja setelah semua usulan dari UPT BPOM diterima), dengan perhitungan perbandingan antar usulan rekomendasi dan rekomendasi yang diselesaikan tepat waktu

5. Sasaran Kegiatan (SK 5): Pengelolaan peralatan laboratorium PPOMN yang optimal.

Indikator Kinerja (IKK 6): Persentase pemeliharaan alat laboratorium yang diselesaikan.

Pemeliharaan alat laboratorium adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara alat laboratorium agar tetap berfungsi dengan baik dan akurat. Pemeliharaan alat laboratorium sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pengujian dan kalibrasi yang dilakukan di laboratorium akurat dan dapat dipercaya. Alat laboratorium adalah alat yang digunakan untuk proses pengujian laboratorium termasuk penunjangnya. Yang diselesaikan adalah proses kegiatan mulai dari pengajuan hingga selesai dengan dibuktikan berita acara serah terima.

Perhitungan pemeliharaan alat laboratorium dan penunjangnya yang diselesaikan adalah jumlah keseluruhan alat dan penunjang laboratorium yang telah selesai dilakukan pemeliharaan (perbaikan, pemastian keabsahan kinerjanya, verifikasi, adjusment dan sebagainya).

Capaian Persentase pemeliharaan alat laboratorium yang diselesaikan sebesar 105,24% dengan kategori sangat baik artinya alat-alat pengujian di Laboratorium PPPOMN terpelihara dengan baik.

Indikator Kinerja (IKK 7): Nilai pemenuhan standar peralatan PPPOMN

Standar peralatan PPPOMN adalah standar pemenuhan alat laboratorium dilingkungan PPPOMN. Nilai pemenuhan adalah jumlah peralatan laboratorium yang eksisting di laboratorium PPPOMN dibandingkan terhadap standar peralatan PPPOMN.

Nilai pemenuhan standar dapat digunakan untuk menilai sejauh mana laboratorium telah memenuhi standar peralatan, prosedur, dan kualitas yang telah ditetapkan.

6. Sasaran Kegiatan (SK 6): Meningkatnya indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi.

Indikator Kinerja (IKK 8): Indeks Pelayanan Publik Balai Kalibrasi. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (30%)
- b. Profesionalitas SDM (18%)
- c. Sarana Prasarana (15%)
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)

e. Konsultasi dan Pengaduan (15%)

f. Inovasi Pelayanan Publik (7%)

Berdasarkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Tahun 2024, Tim Penilai Kinerja UPP BPOM menyatakan bahwa Indeks Pelayanan Publik Balai Kalibrasi tahun 2024 adalah 4,35 dengan predikat Pelayanan Prima.

#### 7. Sasaran Kegiatan (SK 7): Terwujudnya SDM Balai Kalibrasi Yang Berkinerja Optimal

Indikator Kinerja (IKK 9): Indeks Profesionalisme ASN Balai Balai Kalibrasi

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. IP ASN bertujuan memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan pengukuran IP ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan

IP ASN terdiri dari 4 dimensi, yaitu:

- a. Dimensi Kualifikasi (25%): mengukur tingkat pendidikan formal ASN
- b. Dimensi Kompetensi (40%): mengukur kemampuan ASN berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
- c. Dimensi Kinerja (30%): mengukur capaian sasaran kerja pegawai ASN
- d. Dimensi Disiplin (5%): mengukur kesanggupan ASN menaati kewajiban dan menghindari larangan

Pengukuran IP ASN dilakukan secara berkala setiap tahun dan hasilnya digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi untuk pengembangan profesionalisme ASN. Hasil pengukuran IP ASN juga digunakan sebagai instrumen kontrol sosial bagi masyarakat untuk memastikan ASN bertindak profesional dalam pelayanan publik.

Masih terdapat pegawai yang belum mengikuti diklat teknis, sehingga penilaian pada dimensi kompetensi menjadi tidak maksimal. Masih terdapat pegawai yang belum menduduki Jabatan Fungsional Tertentu, sehingga penilaian pada dimensi kompetensi menjadi tidak maksimal. Rata-rata predikat kinerja pegawai adalah Baik, sehingga nilai maksimal pegawai pada dimensi kinerja hanya 35.

Selanjutnya untuk renstra yang akan datang perlu dilakukan:

- a. Menyederhanakan aturan dan menambah pegawai tugas

belajar, terutama untuk pegawai dengan pendidikan dibawah syarat minimum pendidikan pada jabatan terakhirnya.

- b. Memberikan penugasan kepada pegawai untuk mengikuti diklat teknis.
- c. Merencanakan seluruh Pegawai menduduki Jabatan Fungsional Tertentu.

8. Sasaran Kegiatan (SK 8): Terkelolanya Laboratorium Balai Kalibrasi

Indikator Kinerja (IKK 10): Terpeliharanya Status Akreditasi Laboratorium Balai Kalibrasi.

ISO/IEC 17025:2017 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Standar ini diterbitkan oleh *International Organization for Standardization (ISO)* dan *International Electrotechnical Commission (IEC)*. ISO/IEC 17025:2017 mencakup beberapa aspek, termasuk:

- a. Ruang lingkup: Standar ini menetapkan persyaratan untuk laboratorium yang melakukan pengujian dan kalibrasi.
- b. Referensi normatif: Standar ini mengacu pada standar lain yang terkait, seperti ISO 9001 dan ISO/IEC 17000.
- c. Istilah dan definisi: Standar ini mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam standar ini.
- d. Persyaratan umum: Standar ini menetapkan persyaratan umum untuk laboratorium, termasuk kompetensi, imparialitas, dan konsistensi.
- e. Persyaratan struktural: Standar ini menetapkan persyaratan untuk struktur organisasi laboratorium, termasuk peran dan tanggung jawab.
- f. Persyaratan sumber daya: Standar ini menetapkan persyaratan untuk sumber daya, termasuk personel, peralatan, dan fasilitas.
- g. Persyaratan proses: Standar ini menetapkan persyaratan untuk proses pengujian dan kalibrasi, termasuk pengendalian data dan pengendalian peralatan.
- h. Persyaratan manajemen: Standar ini menetapkan persyaratan untuk manajemen laboratorium, termasuk perencanaan, pengendalian, dan perbaikan.

9. Sasaran Kegiatan (SK 9): Terpenuhinya Standar Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Kalibrasi.

Indikator Kinerja (IKK 11): Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan

Laboratorium Balai Kalibrasi.

Standar Kemampuan Pengujian atau Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium meliputi Standar Ruang Lingkup (RL), Standar Peralatan dan Standar Kompetensi Penguji. Komponen SKL Balai Kalibrasi terdiri dari Ruang Lingkup dan Kompetensi. Nilai pemenuhan RL Balai Kalibrasi dihitung berdasar rerata Nilai pemenuhan RL Balai Kalibrasi capaian indikator ini sebesar 101,69 % dengan kategori Sangat Baik. Diharapkan kedepannya Balai kalibrasi bisa meningkatkan capaiannya dengan adanya peningkatan komponen SKL .

10. Sasaran Kegiatan (SK 10): Terkelolanya Keuangan Balai Kalibrasi Secara Akuntabel.

Indikator Kinerja (IKK 12): Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Kalibrasi.

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran (TEPA) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi atau lembaga telah menggunakan anggarannya secara efisien. TEPA dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{TEPA} = (\text{Realisasi Belanja} / \text{Anggaran}) \times 100\%$$

Keterangan:

- Realisasi Belanja: Jumlah belanja yang telah dikeluarkan oleh organisasi atau lembaga dalam suatu periode tertentu.
- Anggaran: Jumlah anggaran yang telah ditetapkan untuk suatu periode tertentu.

TEPA dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- TEPA > 90%: Sangat Efisien
- 80% < TEPA ≤ 90%: Efisien
- 70% < TEPA ≤ 80%: Cukup Efisien
- 60% < TEPA ≤ 70%: Kurang Efisien
- TEPA ≤ 60%: Tidak Efisien

Namun, perlu diingat bahwa TEPA hanya salah satu ukuran efisiensi penggunaan anggaran, dan harus digunakan bersama dengan ukuran lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang efisiensi penggunaan anggaran.

Pada tahun 2024 dengan target 94, diperoleh realisasi sebesar 95.78 dan capaian sebesar 101,89% (kategori Sangat Baik). Ke depannya Balai Kalibrasi terus berusaha meningkatkan efisiensi anggaran dengan baik.

### I.1.2. Aspirasi Stakeholder

Dalam menghadapi tantangan masa depan, Balai Kalibrasi memahami pentingnya upaya memperkuat layanan kalibrasi untuk mendukung perkuatan pengawasan obat dan makanan dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dari stakeholder menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu Balai Kalibrasi dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan stakeholder, tapi juga memungkinkan Balai Kalibrasi untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi. Kalibrasi peralatan laboratorium bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi stakeholder, Balai Kalibrasi dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu kalibrasi peralatan laboratorium terkini.

Aspirasi stakeholder juga membantu Balai Kalibrasi dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi peralatan dan dinamika kebutuhan stakeholder yang dapat mempengaruhi pola tata kelola kalibrasi peralatan laboratorium. Hal ini penting agar Balai Kalibrasi dapat menyesuaikan kebijakan, mekanisme, dan kebutuhan kalibrasi peralatan laboratorium. Balai Kalibrasi telah melakukan penjangkaran aspirasi melalui kegiatan Forum Komunikasi Publik dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Setiap masukan yang telah diterima, menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis Balai Kalibrasi 2025-2029. Beberapa aspirasi dan harapan *stakeholder* dalam peningkatan kinerja Balai Kalibrasi antara lain:

1. Penambahan ruang lingkup kalibrasi  
Berkembangnya teknologi peralatan laboratorium yang disertai meningkatnya kebutuhan pelanggan, menuntut Balai Kalibrasi untuk menambah ruang lingkup kalibrasi agar Balai Kalibrasi senantiasa relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi peralatan dan mendukung kebutuhan *stakeholder*.
2. Meningkatkan waktu pelayanan  
Peningkatan waktu pelayanan merupakan salah satu faktor kunci kualitas pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan

- kepuasan *stakeholder*, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, dan mendukung implementasi reformasi birokrasi.
3. Menambah kapasitas/jumlah kalibrasi peralatan laboratorium  
Perkembangan organisasi dengan Penambahan jumlah UPT di lingkungan BPOM dan pertumbuhan jumlah dan jenis peralatan laboratorium meningkatkan jumlah peralatan laboratorium yang harus dikalibrasi.
  4. Meningkatkan kompetensi petugas layanan  
Peningkatan kompetensi petugas layanan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi pelayanan dan membangun kepercayaan *stakeholder*.

## **I.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Penyusunan Renstra 2025-2029 Balai Kalibrasi diperlukan untuk merespon potensi permasalahan yang muncul. Potensi permasalahan memiliki hubungan yang erat dengan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Analisis SWOT adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat mempengaruhi kemampuan Balai Kalibrasi untuk mencapai tujuannya dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan bagi masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja, perlu dilakukan analisis yang terpadu dan menyeluruh terhadap faktor-faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan dan kinerja Balai Kalibrasi. Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi, Balai Kalibrasi menggunakan analisa SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2025-2029. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

### I.2.1. *Strength* (Kekuatan)

1. **Memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kalibrasi dan penyusunan standar peralatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan di lingkungan BPOM.**

Secara kelembagaan, Balai Kalibrasi merupakan unit teknis di BPOM yang memiliki kewenangan melalui tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Kepala Badan No. 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan PPPOMN BPOM untuk melaksanakan kalibrasi peralatan laboratorium BPOM dan menyusun standar kebutuhan peralatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan di lingkungan BPOM.

2. **Terakreditasi ISO 17025 : 2017 dengan nomor LK-047-IDN.**

ISO 17025 : 2017 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Standar ini mencakup aspek-aspek seperti sistem manajemen mutu, kompetensi teknis, dan pengendalian peralatan dan lingkungan. Laboratorium yang telah diakreditasi ISO 17025:2017 telah menunjukkan kemampuan untuk menyediakan hasil pengujian dan kalibrasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Balai Kalibrasi telah memperoleh predikat terakreditasi ISO 17025 sejak Tahun 2001-sekarang. Melalui akreditasi ISO 17025 : 2017 yang telah diterima lebih dari 20 tahun, Balai Kalibrasi menjadi laboratorium yang memperoleh kepercayaan pelanggan dan *stakeholder* dengan beroperasi secara kompeten, akurat, dan andal serta terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam sistem manajemen laboratorium.

3. **Memiliki sarana dan prasarana kalibrasi serta infrastruktur yang memadai.**

Memiliki sarana dan prasarana kalibrasi yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa proses kalibrasi dapat dilakukan dengan akurat, efektif, dan efisien. Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk mendukung kelancaran tugas kalibrasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan memenuhi persyaratan standar ISO 17025. Sarana dan prasarana tersebut antara lain standar acuan dan peralatan laboratorium penunjang, fasilitas yang lengkap dan teknologi terkini, serta infrastruktur termasuk diantaranya ruang

kalibrasi yang terkontrol suhu dan kelembabannya, sistem manajemen data yang terintegrasi, dan prosedur kalibrasi yang terdokumentasi dan terstandar.

Standar acuan dan peralatan laboratorium penunjang yang memadai sesuai dengan ruang lingkup kalibrasi Balai Kalibrasi ditunjukkan dengan capaian nilai pemenuhan SKL yang terdiri dari komponen Ruang Lingkup, Peralatan, dan Kompetensi Laboratorium. Pada tahun 2025 realisasi pemenuhan nilai SKL sebesar 89,37 (dari target 89,87) atau capaian 100,56%.

**Tabel 1. 2 Perhitungan Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi**

No	Komponen	Nilai SKL Tahun 2025	Pembobotan	Realisasi Tahun 2025
1	Ruang lingkup	90,22	75%	67,66
2	Standar Kompetensi Laboratorium	90,22	15%	13,53
3	Standar Peralatan	86,79	10%	8,18
<b>Hasil Akhir</b>				<b>89,87</b>

4. ***Learning organization dan knowledge management yang membudaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kalibrasi.***

Balai Kalibrasi secara aktif dan terus-menerus memfasilitasi peningkatan dan pengembangan kompetensi baik teknis maupun manajerial sosiokultural bagi seluruh pegawai dan sebagai satuan kerja mandiri secara berkelanjutan menjadi organisasi pembelajar sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian kinerja dan anggaran yang ditetapkan. Implementasi *learning organization* dan *knowledge management* di Balai Kalibrasi antara lain: Program pelatihan dan pengembangan personel, Sistem dokumentasi dan pengelolaan pengetahuan, Komunitas praktek dan diskusi, Sistem *reward* dan pengakuan untuk personel yang berprestasi, Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan proses kalibrasi dan pengelolaan pengetahuan.

I.2.2. *Weakness* (Kelemahan)

1. **Kurangnya jumlah SDM baik teknis maupun administrasi.**

Sebagai satuan kerja mandiri baru, Balai Kalibrasi memiliki keterbatasan khususnya dalam hal sumber daya manusia baik

yang mendukung pekerjaan teknis kalibrasi maupun non teknis/penunjang. Berikut pemenuhan kebutuhan ABK Balai Kalibrasi sesuai Pedoman ABK tahun 2020:

**Tabel 1. 3 Pemenuhan ABK Balai Kalibrasi sesuai Pedoman ABK Tahun 2020 (Data diambil dari aplikasi SIREN bulan Desember 2025)**

No	Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai Kalibrasi	1	1	0	100%
2	Kepala Subbag Tata Usaha	1	1	0	100%
3	Analisis Anggaran Ahli Madya	0	0	0	100%
4	Analisis Anggaran Ahli Muda	0	0	0	100%
5	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	0	1	0%
6	Arsiparis Mahir	1	1	0	100%
7	Arsiparis Terampil	1	0	1	0%
8	Penata Laksanaan Barang Terampil	1	0	1	0%
9	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	1	1	0	100%
10	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	5	5	0	100%
11	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	9	6	3	67%
12	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	0	1	-1	100%

No	Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
13	Perencana Ahli Madya	1	1	0	100%
14	Penata Kelola Obat dan Makanan	0	1	-1	100%
	<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	

Selama tahun 2025, Balai Kalibrasi telah menunjukkan peran pentingnya sebagai salah satu unit penunjang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Balai Kalibrasi perlu merencanakan perkuatan SDM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas SDM yang memadai dengan kompetensi serta kualifikasi yang sesuai dengan tantangan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Balai Kalibrasi bersama dengan Biro SDM dan PPSDM telah mengidentifikasi perkiraan kebutuhan SDM periode 2025-2029 untuk jabatan fungsional PFM sebanyak 30 personel dan non PFM sebanyak 24 personel yaitu JF Pranata Komputer pada jenjang terampil, mahir, ahli pertama, dan ahli muda dengan total sebanyak 6 (enam) personel; JF Arsiparis pada jenjang terampil, mahir, dan ahli pertama dengan total 3 (tiga) personel; JF Pengelolaan Keuangan APBN pada jenjang terampil, mahir, penyelia, ahli pertama, dan ahli muda dengan total 6 (enam) personel; JF Penata Laksana Barang terampil 1 (satu) personel; JF Analis dan Pranata SDM Aparatur pada jenjang terampil, ahli pertama, dan ahli muda dengan total sebanyak 3 (tiga) personel; JF Pranata Hubungan Masyarakat ahli pertama dan ahli muda dengan total sebanyak 2 (dua) personel; JF Perencana ahli pertama dan ahli muda dengan total sebanyak 2 (dua) personel; dan JF Analis Anggaran ahli pertama 1 (satu) personel.

## 2. **Kompetensi personil yang belum terpenuhi.**

Kompetensi personil belum merata terutama dalam penyusunan standar kebutuhan peralatan laboratorium. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan kompetensi SDM kalibrasi yang homogen dan merata guna menunjang penyusunan standar kebutuhan peralatan laboratorium, di samping kolaborasi dengan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan serta UPT lainnya di lingkungan PPPOMN. Kebutuhan peningkatan

kompetensi, khususnya terkait kebutuhan peralatan dalam pelaksanaan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan.

Sebagai satuan kerja baru yang melaksanakan pengelolaan kinerja dan anggaran mandiri, Balai Kalibrasi masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan keuangan termasuk terbatasnya dukungan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan anggaran.

3. **Fasilitas sarana prasarana laboratorium belum sesuai dengan kebutuhan peningkatan ruang lingkup.**

Standar kebutuhan peralatan dan sarana prasarana laboratorium menjadi salah satu dukungan strategis yang termasuk dalam salah satu tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Balai Kalibrasi. Beberapa kemungkinan penyebab fasilitas sarana prasarana laboratorium belum sesuai dengan kebutuhan peningkatan ruang lingkup adalah:

- a. Kurangnya anggaran untuk investasi fasilitas dan peralatan
- b. Kurangnya perencanaan dan pengembangan infrastruktur laboratorium
- c. Perubahan kebutuhan *stakeholders* atau regulasi yang belum dapat dipenuhi dengan fasilitas yang ada
- d. Kurangnya pemeliharaan dan perawatan fasilitas yang ada

Untuk mengatasi hal ini, Balai Kalibrasi perlu melakukan beberapa langkah, seperti:

- a. Melakukan evaluasi dan analisis kebutuhan fasilitas dan peralatan
- b. Membuat rencana pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan ruang lingkup
- c. Meningkatkan pemeliharaan dan perawatan fasilitas yang ada
- d. Mengoptimalkan penggunaan fasilitas yang ada melalui pengelolaan yang lebih efektif

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, Balai Kalibrasi dapat meningkatkan fasilitas sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan ruang lingkup dan meningkatkan kualitas dan kapasitas laboratorium kalibrasi, sesuai dengan *Road Map* Peralatan Laboratorium pada Grand Design Laboratorium BPOM.

Balai Kalibrasi terus berupaya meningkatkan layanan kalibrasi melalui penambahan ruang lingkup yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan baik internal maupun eksternal BPOM. Berdasarkan aspirasi *stakeholder* tersebut Balai Kalibrasi

merencanakan target penambahan/perluasan ruang lingkup Balai Kalibrasi periode tahun 2025-2029 antara lain termometer digital suhu tinggi (600°C), pH meter basa (pH 9,18), *photometric glass filter*, *centrifuge*, dan *conductivity meter*. Dalam rangka mendukung rencana penambahan ruang lingkup tersebut, Balai Kalibrasi perlu melengkapi sarana dan prasarana termasuk standar acuan dan peralatan penunjang yang dibutuhkan seperti standar acuan sensor suhu tinggi dan peralatan penunjang lainnya.

### I.2.3. *Opportunity* (Peluang)

#### 1. **Meningkatnya permintaan layanan kalibrasi dari stakeholder internal maupun eksternal.**

Bertambahnya jumlah UPT BPOM akan sejalan dengan meningkatnya jumlah permintaan layanan kalibrasi peralatan laboratorium. Dengan meningkatnya jumlah layanan kalibrasi maka peran Balai Kalibrasi sebagai unit teknis yang melaksanakan tugas tersebut akan memperkuat perannya dalam mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Meningkatnya permintaan layanan kalibrasi dari stakeholder internal maupun eksternal menunjukkan bahwa Balai Kalibrasi telah memiliki reputasi yang baik dan dipercaya oleh pelanggan.

Namun, meningkatnya permintaan juga dapat menimbulkan tantangan, seperti:

- a. Meningkatkan beban kerja dan tekanan pada personel
- b. Membutuhkan peningkatan kapasitas dan kemampuan laboratorium
- c. Membutuhkan investasi fasilitas dan peralatan yang lebih baik
- d. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Balai Kalibrasi dapat melakukan beberapa langkah, seperti:
- e. Meningkatkan kapasitas personel melalui pelatihan dan pengembangan
- f. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kalibrasi
- g. Menginvestasikan fasilitas dan peralatan yang lebih baik
- h. Mengembangkan strategi pemasaran dan promosi untuk meningkatkan kesadaran dan permintaan layanan kalibrasi

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, Balai Kalibrasi dapat meningkatkan kemampuan untuk memenuhi permintaan

layanan kalibrasi yang meningkat dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan.

2. **Peningkatan kebutuhan ruang lingkup Balai Kalibrasi.**

Bertambahnya jumlah UPT di lingkungan BPOM, pertumbuhan jumlah peralatan, dan perkembangan teknologi peralatan laboratorium menuntut Balai Kalibrasi untuk memperoleh ruang lingkup lainnya yang terakreditasi.

3. **Membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal BPOM.**

Membangun kemitraan menjadi salah satu pendekatan strategis dalam memperkuat peran Balai Kalibrasi, namun kelemahan masih ditemukan pada aspek identifikasi pemangku kepentingan, identifikasi peran strategis dan teknis antara Balai Kalibrasi dan para pemangku kepentingan, dan inisiasi pembentukan kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Dengan kemitraan yang kuat, Balai Kalibrasi dapat:

- a. Meningkatkan akses ke sumber daya dan keahlian
- b. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kebutuhan dan harapan pelanggan
- c. Meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dalam pengembangan dan implementasi standar
- d. Meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas laboratorium

4. **Perencanaan pemenuhan peralatan laboratorium di lingkungan BPOM yang lebih efektif dan efisien.**

Balai Kalibrasi memiliki peluang besar melaksanakan peran strategis melalui perencanaan pemenuhan peralatan laboratorium di lingkungan BPOM dengan lebih efektif dan efisien sehingga peralatan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan.

5. **Menjadi *laboratorium center of excellence* untuk mendukung program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.**

Balai Kalibrasi berkomitmen kualitas hasil kalibrasi dan melakukan inovasi berkelanjutan dengan fungsi sebagai pusat rujukan kalibrasi peralatan laboratorium guna mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Balai Kalibrasi perlu:

- a. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas personel
- b. Meningkatkan fasilitas dan peralatan laboratorium

- c. Meningkatkan sistem manajemen mutu dan akreditasi
- d. Meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan
- e. Meningkatkan inovasi dan pengembangan metode kalibrasi

Dengan menjadi center of excellence, Balai Kalibrasi dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia

#### I.2.4. *Threats* (Ancaman)

##### 1. **Potensi kegagalan dalam mempertahankan status akreditasi.**

Perkembangan teknologi peralatan pengujian sediaan farmasi dan makanan yang dinamis menuntut Balai Kalibrasi untuk memastikan keandalan, akurasi hasil, dan jaminan kualitas yang merujuk pada *good laboratory practice* (GLP). Berdasarkan hal tersebut, disamping penerapan QMS ISO 9001:2015, Balai Kalibrasi harus menerapkan dan mempertahankan ISO 17025:2017 yang juga memberikan manfaat positif bagi Badan POM, diantaranya:

- a. Memperoleh dan mempromosikan pengakuan formal sebagai laboratorium kalibrasi yang kompeten
- b. Memperoleh pengakuan terhadap data hasil kalibrasi baik dari dalam maupun luar negeri
- c. Memudahkan kerjasama antar laboratorium dan atau antar instansi dalam tukar menukar informasi, pengalaman, standar, dan prosedur.

Dalam rangka mempertahankan status akreditasi Balai Kalibrasi telah berupaya memenuhi persyaratan akreditasi, melakukan audit internal secara rutin setahun sekali, melakukan kalibrasi ulang terhadap standar acuan yang dimiliki ke laboratorium kalibrasi yang memiliki ketertelusuran lebih tinggi, memantau dan mengendalikan lingkungan kalibrasi, melakukan pelatihan dan pengembangan personel, memastikan pelaksanaan kalibrasi menggunakan standar acuan yang terkalibrasi, mendokumentasikan prosedur kalibrasi, melakukan verifikasi dan validasi, serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

##### 2. **Keluhan dan pengaduan pelanggan terhadap hasil kalibrasi dan rekomendasi peralatan.**

Sebagai unit pelayanan publik, Balai Kalibrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima, mengelola dan menindaklanjuti pengaduan yang diterima serta menganalisis penyebab sehingga

tidak terjadi pengaduan dan/atau keluhan berulang atas hasil kalibrasi dan rekomendasi peralatan. Pengaduan yang tidak direspon dan/atau tidak ditindaklanjuti akan berdampak terhadap menurunnya reputasi Balai Kalibrasi dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Balai Kalibrasi.

3. **Perkembangan teknologi peralatan analitik laboratorium yang semakin cepat.**

Perkembangan sediaan farmasi dan pangan olahan berdampak pada peningkatan teknologi peralatan pengujian yang signifikan. Dengan adanya inovasi dalam teknologi sediaan farmasi dan pangan olahan, seperti pengembangan produk baru, bentuk sediaan yang lebih kompleks, dan peningkatan kualitas produk, maka diperlukan peralatan pengujian dengan teknologi tinggi dan akurat untuk memastikan keamanan, kualitas, dan khasiat sediaan farmasi dan pangan olahan.

Perkembangan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diikuti dengan perkembangan teknologi peralatan harus diikuti dengan kemampuan dan kapasitas Balai Kalibrasi dalam rangka menunjang hasil pengujian dan pengambilan keputusan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Apabila Balai Kalibrasi gagal dalam mengikuti perkembangan teknologi pengujian, maka berpotensi menyebabkan:

- a. Hasil analisis pengujian yang tidak akurat, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait keamanan dan kualitas produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Kegagalan dalam mendeteksi kontaminan atau zat aktif yang tidak diinginkan, yang dapat menyebabkan risiko kesehatan bagi masyarakat.
- b. Kerusakan reputasi bagi instansi BPOM karena kesalahan dalam analisis sediaan farmasi dan pangan olahan.
- c. Laboratorium di lingkungan BPOM harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk melakukan kalibrasi terhadap peralatan laboratoriumnya ke laboratorium kalibrasi eksternal.
- d. Laboratorium di lingkungan BPOM tidak dapat meningkatkan kualitas pengujian, sehingga tidak relevan terhadap kebutuhan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan yang semakin berkembang.

**Tabel 1. 4 Matriks SWOT Balai Kalibrasi**

<b>Kekuatan (<i>Strength</i>)</b>	<b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kalibrasi dan penyusunan standar peralatan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan di lingkungan BPOM.</li> <li>2. Terakreditasi ISO 17025 : 2017 dengan nomor LK-047-IDN.</li> <li>3. Memiliki sarana dan prasarana kalibrasi serta infrastruktur yang memadai.</li> <li>4. <i>Learning organization</i> dan <i>knowledge management</i> yang membudaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kalibrasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya jumlah SDM baik teknis maupun administrasi.</li> <li>2. Kompetensi personil yang belum terpenuhi.</li> <li>3. Fasilitas sarana prasarana laboratorium belum sesuai dengan kebutuhan peningkatan ruang lingkup.</li> </ol>
<b>Peluang (<i>Opportunity</i>)</b>	<b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya permintaan layanan kalibrasi dari stakeholder internal maupun eksternal.</li> <li>2. Peningkatan kebutuhan ruang lingkup Balai Kalibrasi.</li> <li>3. Membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal BPOM.</li> <li>4. Perencanaan pemenuhan peralatan laboratorium di lingkungan BPOM lebih efektif dan efisien.</li> <li>5. Menjadi <i>laboratorium center of excellence</i> untuk mendukung program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi kegagalan dalam mempertahankan status akreditasi.</li> <li>2. Keluhan dan pengaduan pelanggan terhadap hasil kalibrasi dan rekomendasi peralatan.</li> <li>3. Perkembangan teknologi peralatan analitik laboratorium yang semakin cepat.</li> </ol>



**BADAN POM**

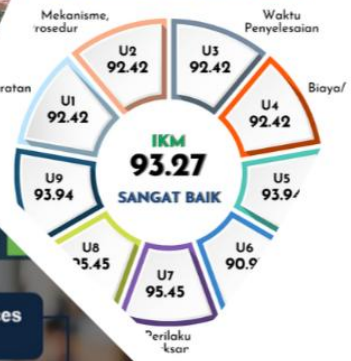


BALAI KALIBRASI



### KEPUASAN MASYARAKAT BALAI KALIBRASI 2025

#### Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



# BAB II

## VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN BALAI KALIBRASI

#### II.1. VISI

Sesuai tugas dan fungsinya, Balai Kalibrasi merupakan unit yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025–2029, yaitu:

**"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"**

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

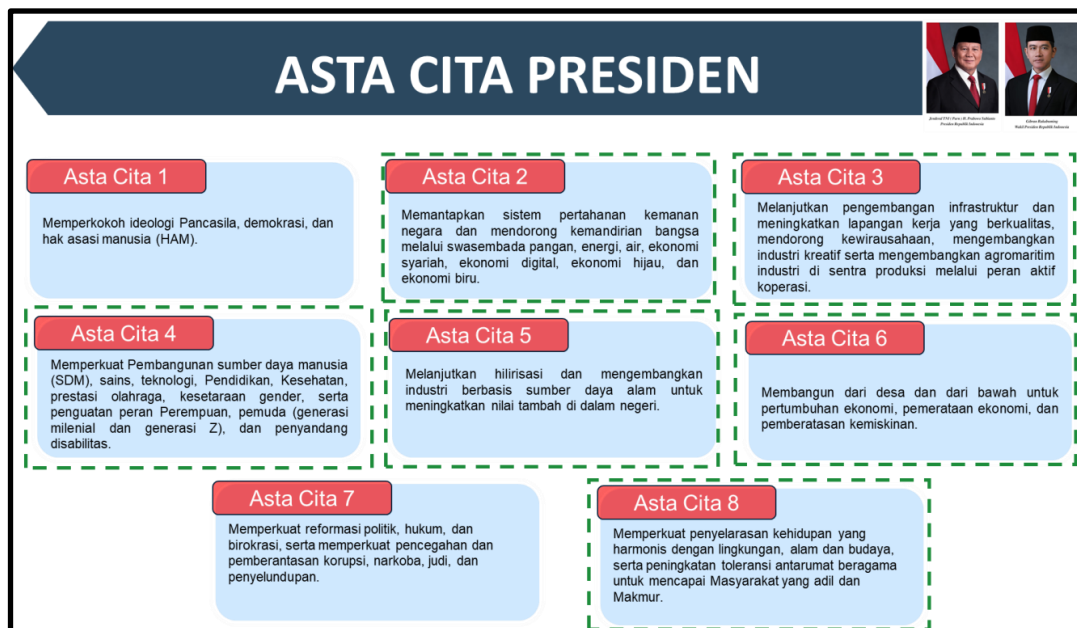
1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang

sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025–2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan. Begitupun demikian dengan Visi Balai Kalibrasi akan melingkupi seluruh Visi BPOM untuk periode 2025–2029.

## II.2. MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



**Gambar 2. 1 Misi Asta Cita Presiden**

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga

mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing. BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM

berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai Kalibrasi mendukung misi BPOM nomor 1 dan 4 sebagaimana penjelasan di atas. Berdasarkan misi tersebut, misi Balai Kalibrasi untuk mencapai visi BPOM 2025–2029 adalah:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui penjaminan ketertelusuran nilai benar dan nilai ketidakpastian pengukuran terhadap pemenuhan standar acuan kalibrasi; pelaksanaan kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan; pelaksanaan pengembangan metode kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan; dan pelaksanaan penyusunan standar kebutuhan peralatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
2. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang kalibrasi; pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kalibrasi; dan pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik, manajemen risiko.

### **II.3. TUJUAN**

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025–

2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia.

Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025–2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini,

BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025–2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2. 1 Indikator Tujuan BPOM 2025–2029**

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan					
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Memperhatikan tujuan BPOM di atas, dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, pada periode 2025–2029, Balai Kalibrasi mendukung tujuan BPOM nomor 1 dan 5. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, tujuan pelaksanaan kegiatan dan program kerja yaitu:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
2. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Tujuan ini merupakan upaya untuk menerjemahkan visi dan misi ke dalam arah strategis yang terukur. Tujuan ini disusun sebagai

landasan bagi perencanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai pedoman dalam penguatan kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan. yang andal guna mendukung efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

#### II.4. SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, dilakukan upaya yang terintegrasi dengan fokus peningkatan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima.

**Gambar 2. 2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM terkait Tugas dan Fungsi Balai Kalibrasi serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai Kalibrasi 2025-2029**



No.	Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan Balai Kalibrasi
				laboratorium (SKL) balai kalibrasi
2	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima  Indikator: Indeks RB BPOM	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima  Indikator: Indeks RB BPOM	Layanan Publik Balai Kalibrasi yang Prima  Indikator: - Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi  Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal  Indikator: - Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi - Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi - Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi - Nilai AKIP Balai Kalibrasi

1. Meningkatnya laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium:

Sasaran ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan laboratorium Balai Kalibrasi pada aspek ruang lingkup kalibrasi yang terakreditasi, peralatan laboratorium termasuk kalibrator/standar, dan kompetensi personil guna menunjang pelaksanaan tugas kalibrasi peralatan laboratorium BPOM. Sasaran ini didukung oleh indikator kegiatan “Persentase Alat

Laboratorium yang Dikalibrasi sesuai Standar” dan “Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Kalibrasi”. Sasaran Persentase Alat Laboratorium yang Dikalibrasi sesuai Standar didukung oleh indikator Persentase Alat Laboratorium yang Dikalibrasi sesuai Standar dan Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Kalibrasi.

2. Layanan Publik Balai Kalibrasi yang Prima:

Sebagai salah satu unit pelayanan publik di BPOM, Balai Kalibrasi berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai Kalibrasi, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Balai Kalibrasi mendukung pelayanan publik BPOM dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) Balai Kalibrasi.

3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal:

Sasaran ini ditujukan untuk membangun Balai Kalibrasi sebagai unit organisasi yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Kalibrasi. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator: (1) Nilai Pembangunan Zona Integritas Balai Kalibrasi; (2) Nilai AKIP Balai Kalibrasi; (3) Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi; dan (4) Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian yaitu:

- a. Memastikan Rencana Aksi ZI relevan dan cukup untuk mencapai target sasaran kegiatan;
- b. Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP dari Inspektorat Utama;
- c. Melakukan reviu dan perbaikan kerangka logis kinerja dengan menentukan kondisi/outcome atau kinerja yang akan diwujudkan dan Critical Success Factors dari outcome tersebut, mulai dari kinerja strategis sampai kinerja operasional; dan
- d. Memastikan mitigasi risiko telah dilaksanakan dalam kegiatan Balai Kalibrasi.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan Balai Kalibrasi 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran strategis tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Balai Kalibrasi untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran strategis kegiatan Balai Kalibrasi sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3.

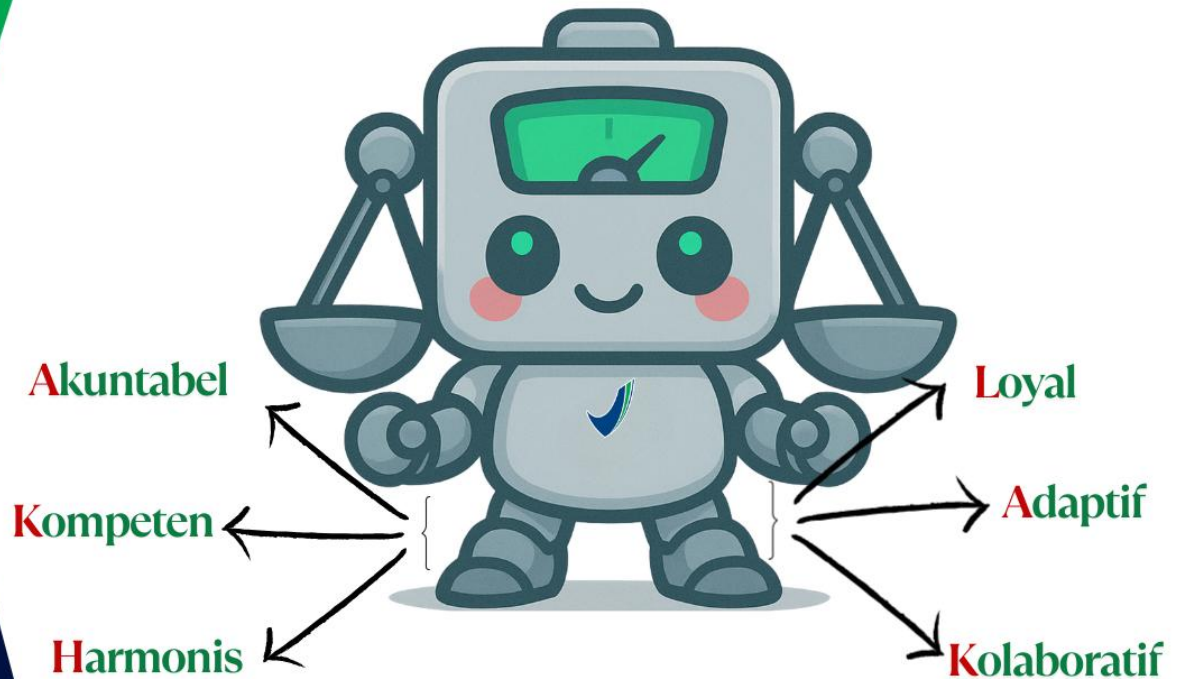
**Tabel 2. 2 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai Kalibrasi**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Terdapat peralatan laboratorium BPOM yang tidak terkalibrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaji ulang Permintaan Kalibrasi</li> <li>- Mencari laboratorium kalibrasi lain sebagai alternatif</li> <li>- Perencanaan termasuk penyusunan jadwal pelaksanaan kalibrasi yang baik</li> </ul>	Tim Layanan Kalibrasi
		Balai Kalibrasi tidak memenuhi nilai SKL yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rutin Melakukan MONEV pemenuhan SKL Balai Kalibrasi sesuai dengan kebutuhan laboratorium BPOM</li> <li>- penambahan ruang lingkup, peningkatan kompetensi pegawai dan</li> </ul>	Tim SKL Balai Kalibrasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			penambahan peralatan Balai Kalibrasi	
2	Layanan Publik Balai Kalibrasi yang Prima	<p>Hasil Kalibrasi yang dilaporkan salah</p> <p>Tidak tercapainya Indeks Pelayanan Publik Balai Kalibrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan evaluasi berjenjang terhadap Laporan Hasil Kalibrasi (LHK) sebelum diterbitkan sertifikat kalibrasi</li> <li>- Kaji ulang Permintaan Kalibrasi</li> <li>- Memastikan Proses administrasi dan penandaan alat yang dikalibrasi telah lengkap dan jelas</li> <li>- Menyusun Standar dan Maklumat Pelayanan</li> <li>- Melaksanakan Forum Komunikasi Publik</li> <li>- Melaksanakan dan menindaklanjuti Survei Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Balai Kalibrasi secara berkala</li> </ul>	Tim Kalibrasi dan Tim Pelayanan Publik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Balai Kalibrasi tidak mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi	Monitoring dan evaluasi implementasi rencana kerja pembangunan zona integritas Balai Kalibrasi secara berkala (triwulan)	Tim Pembangunan Zona Integritas Balai Kalibrasi
		Risiko di Balai Kalibrasi belum seluruhnya dikelola dengan baik  Indeks Maturitas Manajemen Risiko Balai Kalibrasi tidak tercapai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penunjukan personel yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan masing-masing risiko.</li> <li>- Rutin Melakukan MONEV MANRISK Balai Kalibrasi</li> </ul>	Tim MANRISK / SPIP Balai Kalibrasi
		Nilai AKIP tidak tercapai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan dan penetapan target kinerja dan anggaran dengan baik</li> <li>- Monev capaian kinerja dan anggaran Balai Kalibrasi secara berkala (triwulan)</li> </ul>	Tim Akuntabilitas

**Berorientasi pelayanan**



**BALAI KALIBRASI SUPER**

**Semangat Untuk Pelayanan Prima**

# **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **III.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM**

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin. Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek

keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional

maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat. Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
3. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.

4. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
5. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
6. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
7. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

**Tabel 3. 1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025–2029**

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>post market</i> sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i>	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

### III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Balai Kalibrasi mendukung arah kebijakan BPOM nomor 1, 6, dan 7 yaitu:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis.
2. Peningkatan kapasitas SDM dan kualitas kalibrasi peralatan laboratorium.
3. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Balai Kalibrasi merumuskan strategi guna mencapai arah kebijakan tersebut, antara lain:

1. Penguatan dalam Kalibrasi Alat laboratorium BPOM. Semakin bertambahnya kemajuan teknologi mendorong munculnya peralatan baru, Balai kalibrasi harus meningkatkan kemampuannya.
2. Penguatan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Kalibrasi.
3. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas hasil kalibrasi, dan pemanfaatan TIK yang modern.

4. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran Balai Kalibrasi.

**Tabel 3. 2 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Balai Kalibrasi 2025–2029**

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan dalam Kalibrasi Alat laboratorium BPOM. Semakin bertambahnya kemajuan teknologi mendorong munculnya peralatan baru, Balai kalibrasi harus meningkatkan kemampuannya.  Penguatan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Kalibrasi.
Peningkatan kapasitas SDM dan kualitas kalibrasi peralatan laboratorium	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas hasil kalibrasi, dan pemanfaatan TIK yang modern.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran Balai Kalibrasi.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai Kalibrasi juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pada 2025–2029 Balai Kalibrasi melaksanakan kegiatan:

### **1. Pengujian Obat dan Makanan**

Balai Kalibrasi memiliki tugas melaksanakan layanan teknis kalibrasi alat ukur laboratorium. Balai Kalibrasi memberikan layanan kalibrasi ke seluruh laboratorium di UPT BPOM dan laboratorium di Pusat untuk menjamin ketertelusuran kebenaran nilai ukur terhadap peralatan laboratorium pengujian Badan POM.

Dalam mendukung program pengawasan obat dan makanan dapat dipertanggungjawabkan Balai Kalibrasi harus menggunakan peralatan yang memiliki akurasi dan validitas yang baik, hal tersebut dapat diperoleh dengan mengkalibrasikan alat standar kalibrasi secara berkala sesuai persyaratan masing-masing alat standar tersebut.

Implementasi jaminan mutu hasil kalibrasi dilakukan dengan program uji banding laboratorium kalibrasi dan kaji ulang personel Balai Kalibrasi.

Sebagaimana tertuang dalam ISO/IEC 17025:2017, setiap laboratorium harus memiliki prosedur yang jelas termasuk dalam hal pemilihan dan validasi metode, sehingga Balai Kalibrasi melakukan pengembangan metode kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan.

Balai Kalibrasi telah melaksanakan sistem manajemen terintegrasi, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan dengan menggabungkan berbagai standar manajemen dalam suatu kerangka kerja terpadu yang meliputi SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Kalibrasi, SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, SNI ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan SNI ISO/IEC 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Disamping sistem manajemen terintegrasi, Balai Kalibrasi terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sejak tahun 2001. Dalam rangka mempertahankan akreditasi, dilaksanakan pelaksanaan reakreditasi setiap 5 (lima) tahun dengan pelaksanaan surveilen sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang akreditasi.

Dalam aspek teknis, peningkatan kemampuan laboratorium menjadi fokus penting. Balai Kalibrasi secara berkelanjutan memastikan laboratorium pengawasan memenuhi standar kemampuan laboratorium (SKL), termasuk pemenuhan ruang lingkup kalibrasi peralatan, peningkatan kompetensi laboratorium, dan pemenuhan peralatan laboratorium.

Balai Kalibrasi merupakan salah satu unit pelayanan publik BPOM yang menyelenggarakan layanan kalibrasi melalui DIKOLABORASI dan INFALABS. Hal ini bertujuan memperluas jangkauan pelayanan dan membangun kepercayaan publik terhadap upaya pengawasan Obat dan Makanan melalui kalibrasi peralatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan.

## **2. Program dukungan manajemen**

Program ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM dimana dalam pelaksanaannya Balai Kalibrasi melakukan rencana aksi pelayanan internal termasuk penatausahaan, penilaian, pengalihan, monitoring dan penyusunan laporan BMN. Selain itu pelayanan bagi pegawai Balai Kalibrasi berupa gaji dan tunjangan serta penunjang operasional dan pemeliharaan kantor.



# SERTIFIKAT AKREDITASI

LK-047-IDN

Ditetapkan tanggal : 1 Agustus 2022

Berlaku hingga : 17 Juli 2023

Diberikan kepada

**Balai Kalibrasi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan**

di

**Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta**

yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai

**LABORATORIUM KALIBRASI**

dengan menerapkan secara konsisten

**SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)**

Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan

untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran

**KOMITE AKREDITASI NASIONAL**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE



**BADAN POM**

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### IV.1. TARGET KINERJA

Dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi BPOM Balai Kalibrasi menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, dan target sebagaimana disajikan dalam tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4. 1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan laboratorium (SKL) balai kalibrasi	89,37	92,96	93,10	96,60	100
2	Layanan Publik Balai Kalibrasi yang Prima	Indeks pelayanan publik Balai Kalibrasi	4,40	4,45	4,50	4,55	4,60
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	75,0	76,0	77,0	78,0	80,0
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	4	4	4	4	4
		Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	2,0	2,05	2,10	2,15	2,20
		Nilai AKIP Balai Kalibrasi	-	75	75,50	76,00	76,50

#### IV.2. KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Balai Kalibrasi periode 2025–2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Balai Kalibrasi Berdasarkan Kegiatan**

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengujian Obat dan Makanan	5.064,1	6.370,9	8.027,4	10.129,9	12.801,9
<b>TOTAL</b>	<b>5.064,0</b>	<b>6.370,9</b>	<b>8.027,4</b>	<b>10.129,9</b>	<b>12.802,0</b>

**Tabel 4. 3 Kerangka Pendanaan Balai Kalibrasi Berdasarkan Sumber Dana**

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	5.064,0	6.276,7	7.923,8	10.015,9	12.676,5
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		94,2	103,6	114,0	125,4
<b>TOTAL</b>	<b>5.064,0</b>	<b>6.370,9</b>	<b>8.027,4</b>	<b>10.129,9</b>	<b>12.802,0</b>



# BAB V

## PENUTUP

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Balai Kalibrasi Tahun 2025–2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja dan pelaksanaan kegiatan di Balai Kalibrasi dalam periode 2025–2029 dengan mengacu pada Renstra BPOM 2025–2029 dan selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Renstra Balai Kalibrasi 2025–2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi yang menjadi pedoman penyusunan perencanaan Balai Kalibrasi dalam melakukan perencanaan kinerja baik menengah maupun tahunan. Renstra Balai Kalibrasi ini juga memuat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran program disertai dengan target selama 2025–2029 yang harus dilaksanakan oleh Balai Kalibrasi sehingga diharapkan seluruh sasaran program dapat mencapai targetnya atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

## LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pengujian Obat dan Makanan							5.064,0	6.370,9	8.027,4	10.129,9	12.802,0
SK 1. Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium											
1.1.	Persentase alat laboratorium yang dikalibrasi sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%					
1.2.	Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Kalibrasi	89,37	92,96	93,10	96,60	100					
RO 1: Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar		3028	3240	3467	3709	3969					
RO 2 : Sarana Pengujian Obat dan Makanan		2	22	22	22	22					
SK 2. Layanan Publik Balai Kalibrasi yang Prima											
2.1.	Indeks Pelayanan	4,4	4,45	4,50	4,55	4,6					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Publik Balai Kalibrasi										
RO 1:Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan		1	1	1	1	1					
SK 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Organisasi yang Optimal											
3.1.	Nilai Pembangunan ZI Balai Kalibrasi	75	76	77	78	80					
3.2.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Kalibrasi	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00					
3.3	Indeks Manajemen Risiko Balai Kalibrasi	2	2,05	2,10	2,15	2,20					
3.4	Nilai AKIP Balai Kalibrasi	-	75	75,5	76	76,5					
RO 1: Perangkat pengolah data dan komunikasi		-	3	3	3	3					
RO 2: Laporan Koordinasi Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kalibrasi Instrumen (2026-2029) Catt: 2025 menggunakan RO Kegiatan UPT (3165) "Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan"		-	1	1	1	1					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO 3 : Layanan BMN Catt: RO ini termasuk dalam kegiatan 6384. Layanan Perkantoran		1	1	1	1	1					
RO 4 : Layanan Perkantoran Catt: RO ini termasuk dalam kegiatan 6384. Layanan Perkantoran		1	1	1	1	1					